



## Analisis Konseptual Teori Dan Proses Pelaksanaan Kebijakan Publik

**Putri Ayu Anisya**

Magister Ilmu Administrasi, FISIP, Universitas Muhammadiyah Jakarta,

Korespondensi penulis: [putriayuanisya2@gmail.com](mailto:putriayuanisya2@gmail.com)

**Abstract.** *Public policy is essentially and what is based on authority and power, because public policy is made by a group of people who have legitimate power in a government system. Very often a public policy that is implemented does not side with the people, and only benefits one party. Therefore, public policies provided by the government must have the value of siding with the people so that their implementation is intended to resolve every problem. The purpose of this writing is to discuss conceptual analysis of theories and the process of implementing public policy. The results of the discussion show that public policy is a very important factor in achieving maximum government administration.*

**Keywords:** *Conceptual Analysis; Public Policy Theory; Implementation of Public Policy*

**Abstrak.** Kebijakan publik pada hakikatnya dan yang menjadi dasar adalah suatu kewenangan dan kekuasaan, karena kebijakan publik dibuat oleh sekelompok orang yang mempunyai kekuasaan yang sah dalam sebuah sistem pemerintahan. Sering sekali sebuah kebijakan publik yang dilakukan tidak berpihak kepada rakyat, dan hanya menguntungkan suatu pihak saja. Berangkat dari hal itu, kebijakan publik yang diberikan oleh pemerintah harus mempunyai nilai keberpihakan kepada rakyat sehingga pada pelaksanaannya diperuntukan untuk menyelesaikan setiap permasalahan. Tujuan penulisan ini adalah untuk membahas analisis konseptual teori dan proses pelaksanaan kebijakan public. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kebijakan publik menjadi faktor yang sangat penting di dalam pencapaian penyelenggaraan pemerintahan yang maksimal.

**Kata kunci:** Analisis Konseptual; Teori Kebijakan Publik; Pelaksanaan Kebijakan Publik

### LATAR BELAKANG

Intan (2007) mengatakan bahwa ide atau pemikiran kebijakan publik memuat asumsi bahwa ada tempat dalam kehidupan yang bukan pribadi, tetapi milik bersama. Publik sendiri berisi kegiatan masyarakat yang dipandang perlu untuk diatur.

Intinya, pembuat suatu kebijakan umumnya memikirkan, merencanakan, merumuskan, dan memutuskan serangkaian tindakan yang membentuk kebijakan publik. Bahkan setelah siklus kebijakan publik selesai, fakta situasi sering menunjukkan bahwa tujuan kebijakan itu tidak tercapai. Bagian dari kepentingan politik yang dibawa oleh pihak tertentu seringkali mengganggu kebijakan publik sebagai proses yang krusial.

Menurut Nuryanti (2015), kekuasaan bagi pemerintah untuk mengatur kehidupan rakyat dan menegakkan segala aturan yang telah dibuat dan ditetapkan diperoleh melalui kebijakan publik. Akibatnya, kebijakan public kadang memiliki keuntungan dan kerugian dari rakyat.

Setiap hari begitu banyak persoalan yang muncul di masyarakat sehingga menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan publik untuk

mengatasinya. Salah satunya mengenai persoalan pembangunan fisik dan non fisik kepada masyarakat. Namun, pada kenyataannya sering terjadi disparitas antara keduanya. Efektivitas kebijakan menurun sebagai akibat dari ketimpangan ini, dan kegagalan kebijakan mungkin juga akibat dari ketimpangan ini. Aspek administrasi publik yang berkaitan dengan tindakan yang harus diambil adalah kebijakan publik.

Kebijakan artinya suatu pernyataan atau dokumen tertulis yang memberikan seseorang yang menggerakkan batasan dan arah umum mengenai penetapan ruang lingkup. Dari segi etimologis, kata “kebijakan” dapat diterjemahkan sebagai “serangkaian konsep dan prinsip yang membentuk garis kerja, kepemimpinan, dan cara bertindak.”

Kebijakan juga merupakan terjemahan dari kata “policy”. Kebijakan bisa berupa keputusan yang dibuat oleh para pembuat keputusan, bukan kegiatan rutin yang telah diprogram sebelumnya atau keputusan berdasarkan aturan.

Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan mempunyai tujuan untuk memperoleh atau mencapai tujuan yang telah dibuat dan ditetapkan dan menyediakan sarana penyelesaian masalah melalui pemanfaatan fasilitas tertentu dan ketaatan pada tenggat waktu yang telah ditentukan.

## **METODE PENELITIAN**

Metodologi dalam penulisan ini menggunakan metodologi studi pustaka. Penulisan ini dilakukan dengan meneliti berbagai literatur seperti jurnal, artikel, buku dan berbagai sumber lain yang berkaitan dengan teori dan proses pelaksanaan kebijakan publik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Konseptual Teori dan Pelaksanaan Kebijakan Publik**

#### **Analisis Teori Kebijakan Publik**

Kebijakan adalah alat kekuasaan atau pemerintahan, baik dalam arti governance yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya publik, maupun dalam arti government yang hanya berkaitan dengan aparatur negara. Kebijakan adalah keputusan atau pilihan tindakan yang mengontrol secara langsung bagaimana sumber daya alam, keuangan, dan manusia dikelola dan didistribusikan untuk kepentingan publik—yaitu, untuk kepentingan orang, penduduk, komunitas, atau warga negara. Berbagai ide/gagasan, ideology, teori dan juga kepentingan yang membentuk suatu negara sistem pemerintahan bekerja sama, berkompromi, atau bahkan bersaing untuk membentuk kebijakan.

Leo Agustino (2006) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah keputusan yang tetap pada tempatnya dan ditandai dengan ketegasan atau konsistensi tindakan pembuat kebijakan yang mengambil keputusan dan mengikutinya.

Hogwood dan Gunn, sebaliknya, menyatakan dalam Edi Suharto (2007) bahwa kebijakan publik adalah serangkaian langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Hal ini bukan berarti bahwa pemerintah sendiri memiliki atau mengontrol arti dari "kebijakan". Kebijakan juga terdapat pada lembaga swadaya masyarakat seperti organisasi sosial, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi kerelawanan lainnya.

Menurut Nawawi (2009), realitas kebijakan publik adalah suatu kewenangan atau otoritas karena dikembangkan oleh kelompok yang memiliki kewenangan atau otoritas pemerintah yang sah.

Para ahli telah menawarkan berbagai definisi untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan saat ini, mereka akan saling melengkapi kekurangan yang dihasilkan dari hasil sebelumnya. Sederhananya, setiap keputusan yang dibuat oleh bangsa untuk mencapai tujuannya dianggap kebijakan publik.

Dari perspektif ini, kebijakan publik adalah sarana untuk mendapatkan dan mencapai tujuan yang dapat dicapai melalui implementasi kebijakan publik formal dengan produk perundangan. Yang dimaksud dengan "peraturan perundangan" mengacu pada kebijakan publik yang mengatur upaya nasional untuk membangun masyarakat dan negara. Produk undang-undang bersifat mendinamisasikan, mengantisipasi, dan memberi ruang inovasi karena cenderung bergerak dalam pembangunan.

Obyek dan subyek kebijakan publik terikat dan tunduk pada kebijakan tersebut. paksaan. Kebijakan publik berfungsi sebagai produk hukum dengan memastikan bahwa setiap warga negara dapat menggunakan haknya dan memenuhi tanggung jawabnya.

### **Analisis Pelaksanaan Kebijakan**

Implementasi atau pelaksanaan kebijakan juga dapat dilihat sebagai proses/tahapan, keluaran/output, dan hasil. Implementasi kebijakan dapat dianggap sebagai proses, tindakan dan keputusan yang ditujukan dalam menerapkan keputusan sebelumnya yang dibuat atau dirumuskan oleh pemerintah atau badan legislatif negara bagian. Pandangan ini menyimpang dari pandangan konvensional.

Pada tahun 2006, implementasi kebijakan oleh Leo Agustino didefinisikan oleh ahli yaitu Van Horn dan Van Meter (1975) bahwa setiap perbuatan yang dilaksanakan oleh individu, pejabat, lembaga negara/pemerintah, atau organisasi non pemerintah dengan di

maksud kan untuk memperoleh dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan yang dituangkan dalam keputusan tentang kebijakan.

Sementara, Paul Sabater dan Daniel Mazmanian menegaskan bahwa mengartikan pelaksanaan/implementasi kebijakan sebagai pemberlakuan keputusan kebijakan fundamental, biasanya dalam bentuk undang-undang, dalam bentuk perintah atau keputusan eksekutif yang signifikan. Biasanya, keputusan tersebut mencakup masalah yang akan dipecahkan, sasaran yang akan dicapai, dan beranekaragam opsi untuk menyusun atau mengelola proses pelaksanaan implementasi (Leo, 2006).

### **Implementasi Pelaksanaan Kebijakan Model Carl Van Horn dan Donal Van Meter**

Ada enam (6) variabel menurut pemikiran Van Meter dan Van Horn yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik: (Subarsono, 2011)

#### **1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan**

Hanya jika ukuran kebijakan sesuai dengan lingkungan sosial budaya pada tingkat implementasi, barulah tingkat keberhasilan dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja implementasi kebijakan.

#### **2. Sumberdaya**

Manusia merupakan sumber daya yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan proses implementasi. Tahapan tertentu dari keseluruhan proses implementasi membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang dibutuhkan oleh kebijakan yang ditentukan secara politis. Oleh karena itu, sumber daya waktu dan uang juga harus dipertimbangkan. Suka atau tidak suka atau tidak, ketika dana tidak dapat disalurkan melalui anggaran namun sumber daya manusia yang kompeten dan mumpuni tersedia, pencapaian tujuan kebijakan publik menjadi sulit.

#### **3. Karakteristik Agen Pelaksanaan**

Hal ini sangat penting karena karakteristik lembaga pelaksana yang tepat akan berpengaruh besar terhadap seberapa baik mereka menempatkan kebijakan publik ke dalam kebijakan public dalam suatu pemerintahan.

#### **4. Sikap Para Pelaksana**

Berhasil atau tidaknya kerja implementasi kebijakan publik akan sangat dipengaruhi oleh diterima atau ditolaknya agen-agen pelaksana. Hal ini sangat mungkin terjadi karena

kebijakan-kebijakan yang diberlakukan bukanlah hasil karya warga setempat yang mengetahui dengan baik permasalahan yang mereka hadapi.

## **5. Komunikasi Antarorganisasi**

Komunikasi merupakan cara atau mekanisme yang paling relevan dalam implementasi kebijakan publik.

## **6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik**

Aspek terakhir evaluasi Van Meter dan Van Horn tentang kinerja implementasi publik adalah sejauh mana lingkungan eksternal berkontribusi terhadap keberhasilan kebijakan publik yang ditetapkan. Kinerja yang buruk dalam implementasi kebijakan dapat dikaitkan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan politik.

Jika tidak ada prosedur untuk melaksanakan kebijakan publik, itu tidak akan dilaksanakan. Serangkaian tindakan dalam perumusan dan implementasi kebijakan disebut implementasi kebijakan publik. Metode pelaksanaan strategi publik tergantung pada komponen, aset dan program strategi keterkaitan.

Keberhasilan suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh bagaimana kebijakan itu dipraktikkan. Jika suatu kebijakan berdampak positif bagi masyarakat, maka ia berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut dapat mengarahkan masyarakat untuk lebih terarah dan sejalan dengan keinginan pemerintah.

Jadi otoritas publik memiliki komitmen untuk mengelola pelaksanaan strategi melalui rencana program dan mengatur interaksi pelaksanaan. Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa kegiatan, program, dan kegiatan yang terlibat dalam mewujudkan keputusan kebijakan dalam tindakan untuk mencapai tujuan yang ditentukan dalam keputusan kebijakan merupakan implementasi kebijakan.

### **Faktor yang Mempengaruhi Implementasi pelaksanaan Kebijakan Publik**

Ada berbagai faktor yang akan mempengaruhi bagaimana kegiatan atau kebijakan tersebut dilaksanakan. Banyak ahli kebijakan telah menyebutkan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan implementasi secara umum. Dalam Subarsono (2007), pandangan Edwards (1980), ada empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan:

Komunikasi adalah yang pertama. Implementor harus mendapat informasi yang baik agar kebijakan berhasil. Kedua, aset. Bahkan jika isi kebijakan memiliki telah dikomunikasikan

secara konsisten dan jelas, implementasi tidak akan berhasil jika pelaksana kekurangan sumber daya untuk melaksanakannya.

Ketiga, sikap. Disposisi adalah kepribadian dan sifat pelaksana, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Empat struktur birokrasi. Implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh birokrat struktur yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya.

Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel besar, menurut Marilee, S. Grindle, 1980 dalam Subarsono (2007): Pertama, sejauh mana pencapaian kepentingan kelompok tujuan dimasukkan ke dalam substansi kebijakan. Kedua, jenis keuntungan yang diterima khalayak sasaran. Ketiga, sejauh mana suatu kebijakan perlu diubah. Keempat, tepat tidaknya suatu program ditempatkan. Kelima, apakah kebijakan itu implementer mendapatkan penyebutan secara menyeluruh. Keenam, apakah sumber daya yang tersedia cukup untuk mendukung suatu program.

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan meliputi: Pertama, sejauh mana aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan memiliki kekuasaan, kepentingan, dan strategi. Kedua, karakteristik sistem dan institusi pemerintahan. Ketiga, tingkat konsistensi dan daya tanggap dari pengumpulan tujuan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Kebijakan merupakan usaha untuk mencapai tujuan yang ditetapkan serta sarana penyelesaian masalah dengan memanfaatkan sumber daya tertentu dan berpegang pada tenggat waktu yang telah ditentukan. Strategi sangat penting karena kebijakan dapat menjadi pedoman bagi mencapai tujuan bersama. Tindakan pemerintah yang sadar, disengaja, dan terencana untuk mencapai tujuan tertentu dikenal sebagai kebijakan publik. Jika tidak ada prosedur untuk melaksanakan kebijakan publik, itu tidak akan dilaksanakan.

Serangkaian tindakan dalam perumusan dan implementasi kebijakan disebut implementasi kebijakan publik. Mekanisme, sumber daya, dan keterkaitan antara program kebijakan menjadi dasar dari proses implementasi kebijakan publik. Keberhasilan kebijakan akan dipengaruhi oleh bagaimana kebijakan itu dipraktikkan. Jika sebuah kebijakan berdampak positif bagi masyarakat, berhasil. Hal ini menandakan bahwa kebijakan tersebut dapat menunjukkan untuk lebih terarah, sejalan dengan tujuan pemerintahan. Akibatnya, pemerintahan berkewajiban untuk mengawasi implementasi kebijakan dengan menyusun proses implementasi dan merancang program.

## DAFTAR REFERENSI

- Awan, Abdoellah. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Bridgman, Peter dan Glyn Davis (2004). *The Australian Policy Handbook, Allen and Unwin, Crows Nest*
- Intan, Meutia Fitri. (2017). *Analisis Kebijakan Publik*. Bandar Lampung: Aura
- Keban, Yeremias. (2008). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gaya Media
- Leo, Agustino. (2006). *Dasar-dasar Kebijaksanaan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Nugroho, Adi Saputro. (2011). *Pengaruh Book-Tax Differences terhadap Pertumbuhan Laba*. Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis, UNDIP.
- Nawawi, Ismail. (2009). *Perilaku Administrasi Kajian, Teori, dan Praktik*. Surabaya: ITSPers.
- Nuryanti, Mustari. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Leutika Prio.
- Suharto, Edy. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama
- Solichin Abdul Wahab. (2012). *Analisis kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Subarsono, A. G. (2011). *Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sulaeman, Affan. (1998). *Public Policy-Kebijakan Pemerintah*. Bandung: BKU Ilmu Pemerintahan Program Magister Ilmu-ilmu Sosial pada Institut Ilmu Pemerintahan Kerjasama UNPAD-IIP.
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Jakarta: Center for Academic Publishing Service.